



JURNAL ILMIAH SOCIETY

**Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan
Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi**

Edisi III (Mei - Juni 2013)

ISSN : 2337-4004

Pengaruh Persepsi, Sikap dan Motivasi Terhadap Minat Berwiraswasta Mahasiswa Universitas Negeri Manado. Oleh : Aural B. P. Sampelan; Dr. Drs. W. Areros, M.Si; Prof. Dr. Drs. John Hein Goni; Dr. W. Rumawas, S.Sos, M.Si.

Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan di Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Sulawesi Utara. Oleh : Junior Gagola; Prof. Dr. Lotje Kawet; Prof. Dr. Drs. John Hein Goni; Dr. C.B.D. Pakasi, S.P, M.S.

Kajian Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Studi di Sekretariat Kota Manado). Oleh : Harke N. S. Sumarauw; Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, M.H; Dr. Drs. Johny Lumolos, M.Si; Prof. Dr. Drs. John Hein Goni.

Partisipasi Masyarakat Nelayan Dalam Pembangunan di Desa Ranowanko Kecamatan Tombariri. Oleh : Darren Edwin Sahetapy; Prof. Dr. Drs. J. H. Goni; Dr. Drs. F. Oley., M.S; Dr. Drs. H. Pangemanan., SH, M.Si.

Pengaruh Persepsi Pengguna jasa Pos Terhadap Kualitas Layanan Jasa PT. Pos Indonesia Cabang Manado. (Studi Pada Pengguna Jasa Yang Ada di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado). Oleh : Sherly Ernawaty Susanto; Prof. Dr. Drs. John Hein Goni; Dr. Drs. William A. Areros. M.Si; Drs. Ch. Kojoh. M.Si.

Komunikasi Pemerintah Pada Proses Pemekaran Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Oleh : Eka Liow; Dr. Drs. Johny Lumolos., M.Si; Prof. Dr. Drs. John Hein Goni; Drs. Novie R. Pioh., M.Si.

Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Era Otonomi Daerah (Studi Strategi Kemenangan Namto Hui Roba Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Barat). Oleh : Fiko Onga; Prof. Dr. Donald A. Rumokoy., S.H. M.H; Dr. Drs. Johny Lumolos., M.Si; Drs. Max Rembang., M.Si.

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Oleh : Rini Patasaka; Prof. Dr. Drs. John Hein Goni; Dr. Drs. William Areros, M.Si; Dr. Dra. Hetty Geru, M.Si

Kemampuan Administratif Pegawai Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Studi di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Propinsi Sulawesi Utara). Oleh : Mila Asriani Mauna; Dr. Drs. Johny Lumolos, M.Si; Prof. Dr. Drs. J. H. Goni; Dr. Drs. Michael Mamentu, M.A.

Akuntabilitas Birokrasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat. Oleh : Yulinda Uang; Dr. Drs. Johny Lumolos., M.Si; Prof. Dr. Drs. John H. Goni; Dr. Drs. Michael Mamentu., M.A.

Penerbit dan Alamat Redaksi :

**Jurnal Ilmiah SOCIETY Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan
Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi**

Jalan Kampus Unsrat Bahu - Manado 95115

Telp. 0431-827441, 827240, Fax. 0431-821212. Laman <http://unsrat.ac.id>

Contact Person : 081221007654/ 081325600308

JURNAL ILMIAH
SOCIETY

Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan
Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

PEMBINA

Direktur Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

PENANGGUNGJAWAB

Ketua Prog. Studi PSP : Prof. Dr. John H. Goni
Sekretaris Prog. Studi PSP: Dr. Drs. Johnny Lamolos., M.Si

Dewan Pakar

Dr. Drs William A. Areros., M.Si

Dr. Drs. Riane J. Pio., M.Si

Dr. Drs. I. Nengah Punia., M.Si

PIMPINAN REDAKSI

Dr. Very Y. Londa., S.Sos. M.Si

SEKRETARIS REDAKSI

Alfon Kimbal., S.Sos. M.Si

DEWAN REDAKSI

Dr. Drs. Riane J. Pio., M.Si

Dr. Very Y. Londa., S.Sos. M.Si

Dr. Wehelmina Rumawas., S.Sos. M.Si

Shirley Y.V.I. Goni., S.Sos. M.Si

Edmon R. Kalesaran, S.Sos. M.I.Kom

Alfon Kimbal., S.Sos. M.Si

Dra. Ellie Mingkid., M.Si

MANAGER ADVERTISING

Graciano V. J. Pangula., S.Sos.

MANAGER UMUM

Elvie Kalengkongan

Penerbit dan Alamat Redaksi

Jurnal Ilmiah SOCIETY Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi
Gedung Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Jalan Kampus Unsrat Bahu - Manado

Contak Person : 081221007654/ 081325600308

PENGANTAR REDAKSI

Pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab oleh karena hikmat dan tuntunanNYA sehingga Jurnal Ilmiah SOCIETY dapat menyelesaikan terbitan edisi ke tiga.

Pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan khususnya pengelolaan sumberdaya pembangunan menjadi semakin berkembang oleh karena salah satunya melalui ditemukannya konsep – konsep baru dan eksplorasi teori melalui hasil – hasil penelitian. Menjadi sebuah harapan sekiranya tulisan – tulisan dalam edisi ke tiga ini semakin menambah cakrawala berfikir para ilmuan dan pemerhati masalah sumberdaya pembangunan. Untuk sama – sama dapat memberikan sumbangan yang positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan penyelesaian permasalahan bangsa dan daerah.

Terima kasih untuk para penulis yang telah mempercayakan Jurnal Ilmiah SOCIETY sebagai media dalam mempublikasikan hasil – hasil penelitiannya dan semua pihak yang telah membantu diterbitkannya edisi ke tiga ini.

Redaktur

DAFTAR ISI

Tim Redaksi.....	ii
Pengantar Redaksi	ii
Daftar Isi.....	
Pengaruh Persepsi, Sikap dan Motivasi Terhadap Minat Berwiraswasta Mahasiswa Universitas Negeri Manado. Oleh : Aural B. P. Sampelan; Dr. Drs. W. Areros, M.Si; Prof. Dr. Drs. John Hein Goni; Dr. W. Rumawas, S.Sos, M.Si.....	1
Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan di Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Sulawesi Utara. Oleh : Junior Gagola; Prof. Dr. Lotje Kawet; Prof. Dr. Drs. John Hein Goni; Dr. C.B.D. Pakasi, S.P, M.S.....	11
Kajian Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Studi di Sekretariat Kota Manado). Oleh : Harke N. S. Sumarauw; Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, M.H; Dr. Drs. Johny Lumolos, M.Si; Prof. Dr. Drs. John Hein Goni.....	21
Partisipasi Masyarakat Nelayan Dalam Pembangunan di Desa Ranowanko Kecamatan Tombariri. Oleh : Darren Edwin Sahetapy; Prof. Dr. Drs. J. H. Goni; Dr. Drs. F. Oley., M.S; Dr. Drs. H. Pangemanan., SH, M.Si.....	31
Pengaruh Persepsi Pengguna jasa Pos Terhadap Kualitas Layanan Jasa PT. Pos Indonesia Cabang Manado. (Studi Pada Pengguna Jasa Yang Ada di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado). Oleh : Sherly Ernawaty Susanto; Prof. Dr. Drs. John Hein Goni; Dr. Drs. William A. Areros. M.Si; Drs. Ch. Kojoh. M.Si.....	40
Komunikasi Pemerintah Pada Proses Pemekaran Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Oleh : Eka Liow; Dr. Drs. Johny Lumolos., M.Si; Prof. Dr. Drs. John Hein Goni; Drs. Novie R. Pioh., M.Si.....	49
Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Era Otonomi Daerah (Studi Strategi Kemenangan Namto Hui Roba Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Barat). Oleh : Fiko Onga; Prof. Dr. Donald A. Rumokoy., S.H. M.H; Dr. Drs. Johny Lumolos., M.Si; Drs. Max Rembang., M.Si.....	59

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Oleh : Rini Patasaka; Prof. Dr. Drs. John Hein Goni; Dr. Drs. William Areros, M.Si; Dr. Dra. Hetty Geru, M.Si.....	69
Kemampuan Administratif Pegawai Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Studi di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Propinsi Sulawesi Utara). Oleh : Mila Asriani Mauna; Dr. Drs. Johny Lumolos, M.Si; Prof. Dr. Drs. J. H. Goni; Dr. Drs. Michael Mamentu, M.A.....	81
Akuntabilitas Birokrasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat. Oleh : Yulinda Uang; Dr. Drs. Johny Lumolos., M.Si; Prof. Dr. Drs. John H. Goni; Dr. Drs. Michael Mamentu., M.A.....	89

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN MANGANITU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Oleh :

Rini Patasaka²⁹

Prof. Dr. Drs. John Hein Goni³⁰

Dr. Drs. William Areros, M.Si³¹

Dr. Dra. Hetty Geru, M.Si³²

ABSTRACT

The main Sasarna of PKH is breaking the chains of poverty through improving the quality of human resources (HR) from the aspect of health and education for Very Poor Households (RTSM), so that each RTSM can gain better access to education and health facilities as well as able to meet the nutrient supply. This study aimed to obtain a scientific pengeahuan empirical facts about how the implementor and participant adherence to standards and procedures program PKH rules, and how the process of policy implementation in the district PKH Manganitu Sangihe regency.

By using the method of descriptive research kaulitatif besifat using data collection techniques such as interviews with 20 informants, observation and document study, the results showed that the implementation of the policy penelitian Family Program expectations (PKH) in District Manganitu Sangihe regency circuitry has not run optimally. It can be seen from the implementor and adherence to program participants only partially standard rules and procedures as well as in the process of implementing CCT programs still lack-there still there exist RTSM kekurangan like that does not fit into the recipient, the late payment and distribution errors Commitment Verification Form. So that the goals and objectives of the program can not be achieved optimally.

Keywords: Implementation, Program, Family, Hope.

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) hadir sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan yang berada pada klaster I. Sumodiningrat (2009: 15) menggolongkan PKH ke dalam klaster I, dimana program-program pada kelompok ini memberikan perlindungan sosial dan bantuan sosial kepada sasaran

²⁹ Mahasiswa PPs Unsrat Prog. Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan.

³⁰ Dosen Pada PPs Unsrat Prog. Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan

³¹ Dosen Pada PPs Unsrat Prog. Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan

³² Dosen Pada PPs Unsrat Prog. Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan

yang tepat dan nanti pada gilirannya diharapkan dapat mengalami peningkatan kesejahteraan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yaitu kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) pada RTSM sebagai penerimanya. Sasaran penerima PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga terdiri dari anak usia 0-15 tahun (atau antara usia 15-18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar) dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan PKH adalah ibu atau wanita yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan tetapi jika tidak ada ibu maka nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan.

Pelaksanaan PKH ini diharapkan agar setiap RTSM penerima bantuan dapat memiliki akses lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri warga miskin.

Pelaksanaan PKH di Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe masih terdapat beberapa masalah seperti pemilihan RTSM peserta PKH yang belum tepat sasaran, pelaksanaan pembayaran atau pencairan dana bantuan masih tertunda-tunda, kurangnya kunjungan rutin dan pengawasan petugas Pendamping terhadap RTSM dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai peserta PKH serta pelaksanaan verifikasi komitmen yang masih tertunda-tunda. Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini berupaya memahami kepatuhan implementor dan peserta program terhadap prosedur dan standar aturan Program Keluarga Harapan dan proses implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH).

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Islamy (2009: 20) kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat. Dye (dalam Subarsono, 2011: 2) berpendapat bahwa: "*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*". Berarti kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Pernyataan Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objeknya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, dan bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2011: 38), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Menurut Anderson (dalam Islamy 2009: 17) kebijakan adalah "*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*". Memberi makna bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Jones (dalam Saefullah, 2009: 36) mengemukakan bentuk-bentuk kebijakan publik berupa *legislation, law, statutes, executive orders, regulation, legal opinion*, dan lain sebagainya yang secara resmi dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Berdasarkan pendapat Jones tersebut Saefullah (2009: 36) berpendapat bahwa secara sederhana semua ketentuan-ketentuan resmi atau pernyataan-pernyataan hukum yang menyangkut keputusan dan pelaksanaan program-program dapat dikatakan sebagai kebijakan.

Santosa (2009: 43) juga berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif, implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan. Secara lebih luas, Kusumanegara

(2010: 97) berpendapat bahwa implementasi dapat didefinisikan sebagai proses administrasi dari hukum (statuta) yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan.

Makna yang sama dikemukakan oleh Nugroho (2009: 618) yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih, dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Edward III (dalam Santosa, 2009: 41) bahwa implementasi kebijakan adalah "*Is the stag eof policymaking between the establishment of a policy*". Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh Wahab (2010: 59) yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Saefullah (2009: 39) yang menjelaskan bahwa: "...pada tingkatan pelaksanaan kebijakan menyangkut bagaimana atau sejauh mana suatu kebijakan bisa dilaksanakan dalam dunia nyata ... Pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan bukan hanya dimiliki oleh aparat lembaga dan aparat pelaksana, tetapi juga oleh masyarakat atau pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan". Wahab (2010: 63) berpendapat bahwa dalam implementasi program, khususnya yang melibatkan banyak organisasi/instansi pemerintah atau berbagai tingkatan struktur organisasi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yakni : "(1) pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (*the center* atau pusat); (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (*the periphery*); (3) aktor-aktor perorangan diluar badan-badan pemerintah kepada siapa program-program itu diwujudkan yakni kelompok-kelompok sasaran (*target group*)".

Menurut pendapat Ripley dan Franklin (1986: 54) ada dua hal yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi, yaitu kepatuhan (*Compliance*) dan Apa yang terjadi (*What's happening?*). Kepatuhan menunjuk pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standar aturan yang telah ditetapkan. Sementara untuk "*what's happening*" mempertanyakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya.

Maka dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan bukan hanya dimaknai sebagai suatu proses administrasi dari hukum yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang digunakan agar kebijakan yang telah dibuat mempunyai akibat yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan/mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Suharto (2009: 15) berpendapat bahwa kemiskinan salah satunya berhubungan dengan kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, dalam arti ini kemiskinan dipahami sebagai situasi kelangkaan pelayanan sosial dan rendahnya aksesibilitas lembaga-lembaga sosial seperti lembaga pendidikan, kesehatan dan informasi.

Sejalan dengan pendapat Suharto tersebut, studi SMERU (dalam Suharto 2010: 132) menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri sebagai berikut: (1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan); (2) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi); (3) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga); (4) Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun missal; (5) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumberdaya alam; (6)

Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat; (7) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan; (8) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental; (9) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil)

Pelaksanaan PKH di Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial No. 267/LJS-JS/V/2011 tanggal 6 April 2011 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan PKH Kabupaten/Kota Tahun 2011, dan berpedoman pada Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2011. Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Disamping tujuan umum tersebut, program inipun memiliki tujuan khusus, yaitu : (1) meningkatkan status sosial ekonomi RTSM; (2) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari RTSM; (3) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM; (4) meningkatkan taraf pendidikan bagi anak-anak RTSM.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan memfokuskan pada: (1) Kepatuhan implementor dan peserta program terhadap prosedur dan standar aturan PKH dalam tiga tahapan program yaitu pemilihan dan penetapan peserta program, pembayaran dan verifikasi komitmen; (2) proses implementasi program dalam tiga tahapan program tersebut. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 20 orang yang terdiri dari 1 informan UPPKH Kabupaten Kepulauan Sangihe, 1 informan Camat Manganitu, 1 informan Pendamping Kecamatan Manganitu, 3 informan Kepala-kepala Desa dan 14 informan RTSM. Data dan informasi yang terkumpul kemudian dianalisis dengan langkah-langkah

sebagai berikut: (1) Reduksi Data; (2) Penyajian Data; (3) Menarik Kesimpulan/Verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara umum ada beberapa hal yang dianggap dapat memberi kontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan ataupun program, seperti yang diungkapkan oleh Sabatier (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012: 19), yaitu diantaranya: (1) Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten; (2) Komitmen dan keahlian dari pada pelaksana kebijakan; (3) Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan melihat uraian yang dikemukakan oleh Sabatier tersebut, maka dapat dilihat bahwa untuk mempermudah, memfokuskan kerjanya telah ditetapkan dasar hukum yang jelas dan rinci mengenai tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh Pendamping selaku implementor yaitu dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial No. 08/BJS-BS.0804/VII/2011 tentang Buku Kerja Pendamping PKH Tahun 2011. Namun pada kenyataannya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tersebut Pendamping hanya mematuhi sebagian prosedur dan standar aturan saja yaitu: (1) Melaksanakan validasi; (2) Menginformasikan kepada RTSM ketika akan dilaksanakan pembayaran dana bantuan; dan (3) Pendistribusian Form Verifikasi Komitmen.

Masih ada beberapa tugas dan tanggungjawab yang dilalaikan oleh Pendamping, yaitu (1) tidak melakukan pemutakhiran data rutin status RTSM secara menyeluruh; (2) Tidak mengisi Daftar Kontrol Pembayaran; (3) Tidak memfasilitasi pengangkatan Ketua Kelompok; (4) Tidak melakukan kunjungan rutin ke rumah-rumah RTSM; (5) Tidak melakukan pengawasan terhadap tindakan pemenuhan kewajiban peserta program serta (6) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di lapangan Pendamping kurang melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan. Pendamping hanya menginformasikan ketika akan dilaksanakan pembayaran bantuan.

Ini menunjukkan bahwa tidak ada komitmen Pendamping selaku implementor di tingkat Kecamatan untuk melakukan tanggungjawab yang telah disepakati sejak awal direkrut dan diangkat sebagai petugas Pendamping untuk program ini. Disamping itu, Pendamping terkesan tidak memiliki keahlian berkomunikasi dengan orang khususnya RTSM yang tentu memiliki tempren yang berbeda-beda. Ketidapatuhan Pendmping tersebut disebabkan oleh kurangnya kontrol oleh UPPKH Kabupaten.

Sebagai sasaran dari PKH maka setiap RTSM selaku peserta PKH harus dapat mematuhi ketentuan dalam tiap tahapan program yang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial No. 01/BJS-BS.08.04/V/2011 tentang Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2011, agar dapat terus menerima haknya. Hak peserta PKH yang dimaksud disini adalah kesempatan memperoleh bantuan uang tunai, sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam ketentuan PKH.

Berdasarkan hasil wawancara, RTSM hanya melakukan sebagian prosedru dan standar aturah PKH yaitu; (1) Memanfaatkan uang bantuan untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti membeli baju seragam sekolah, sepatu, kaos kaki, alat tulis menulis, dan tas sekolah; (2) Menggunakan sisa uang bantuan untuk membeli susu bagi anak balita dan kebutuhan makanan sehari-hari. Ada sebagian kewajiban yang tidak mereka penuhi sebagai kelompok sasaran PKH yaitu; (1) Sebagian besar anak RTSM tidak dapat memenuhi 85% kehadiran di sekolah sesuai dengan standar PKH; (2) Tidak melaporkan kepada Pendamping atau UPPKH Kabupaten ketika terjadi perubahan struktur rumah tangga maupun perubahan struktur penerima bantuan di rumah tangganya masing-masing; (3) Sebagian RTSM tidak pernah hadir untuk mengikuti Posyandu.

Berarti bahwa masih kurangnya komitmen dari RTSM untuk memenuhi kewajiban mereka baik untuk komponen pendidikan maupun komponen kesehatan. Selain itu kurangnya materi sosialisasi menjadi salah satu penyebab utama ketidaktahuan mengenai kewajiban RTSM dalam pelaporan perubahan struktur rumah tangga/penerima bantuan yang memberikan dampak terhadap tingkat kepatuhan dari RTSM. Disamping materi sosialisasi yang tidak detail dan

kurang jelas tersebut, hal lain yang juga menjadi penyebab adalah karakteristik RTSM (terdidik atau tidak) sehingga RTSM bersikap pasif pada saat sosialisasi dimana hanya mendengarkan saja dan tidak menanyakan kepada pemberi sosialisasi ketika ada hal-hal yang kurang dimengerti dan dipahami.

Pelaksanaan PKH terdiri dari tiga tahapan penting yaitu pemilihan dan penetapan peserta program, pembayaran dan verifikasi komitmen. Sesuai dengan hasil wawancara pemilihan dan penetapan RTSM sebagai sasaran program di Kecamatan Manganitu sebagian besar sudah cocok dan berhak untuk menjadi penerima bantuan tetapi masih ada beberapa RTSM yang dinilai belum tepat sasaran, Sebab ada dua RTSM yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik dibandingkan peserta PKH lainnya, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai rumah tangga kurang mampu atau rumah tangga miskin. Hal ini disebabkan oleh data RTSM yang menjadi peserta PKH untuk Kabupaten Sangihe adalah data yang diajukan BPS merupakan hasil pendataan sejak tahun 2007.

Persoalan pendataan masyarakat miskin yang bisa dikatakan sebagai permasalahan paling krusial ini pun disebabkan karena proses pendataan hanya dilakukan sekali dalam kurun waktu tertentu dan Pemerintah hanya memberikan wewenang tersebut kepada BPS tanpa melibatkan Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kecamatan dalam proses pendataan tersebut. Pemerintah melakukan hal tersebut dengan maksud agar instansi ini memang independen sehingga data yang diperoleh memang benar dan asli, tanpa ada campur tangan dari Pemerintah setempat untuk menghindari tindakan kolusi dan nepotisme yang kerap kali terjadi.

Pada proses pembayaran masih terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang ada dengan kenyataan di lapangan. Dari hasil wawancara pelaksanaan pembayaran atau penyaluran dana bantuan kepada RTSM sebagai sasaran program dilakukan lewat BRI sering tertunda-tunda sebab keterlambatan pengiriman dana oleh UPPKH Pusat ke No Rekening masing-masing RTSM. Sehingga karena keterlambatan proses transfer dana tersebut mengakibatkan keterlambatan penentuan jadwal dan pelaksanaan pembayaran tidak dapat terlaksana tepat pada triwulan.

Pembuktian bahwa para RTSM memenuhi komitmennya akan dicck oleh Pendamping dengan melaksanakan verifikasi komitmen baik untuk komponen pendidikan maupun komponen kesehatan ke Fasdik dan Faskes. Berdasarkan hasil awawancara pendistribusia Form Verifikasi komitmen untuk Fasdik sudah benar dan bejalan baik tetapi sebaliknya terjadi ketidaksesuaian dalam pendistribusian Form Verifikasi Kesehatan, dimana Form Verifikasi tersebut diantarkan ke Kepala Puskesmas Manganitu untuk di isi. Seharusnya Form Verifikasi Komitmen komponen kesehatan diantarkan ke Kader-kader di tiap Desa karena merekalah yang paling tahu tingkat kehadiran atau kunjungan dari RTSM dalam setiap pelaksanaan Posyandu.

Terjadinya ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh beberapa kemungkinan alasan. *Pertama*, Pendamping sama sekali tidak mengetahui dan tidak berusaha mencari tahu siapa saja Kader yang ada di Desa. *Kedua*, Pendamping tahu siapa Kader di Desa tetapi enggan mendatangnya karena letak rumah mereka yang sulit dijangkau. Alasan ketiga, karena Pendamping kurang memahami ketentuan yang ada mengenai verifikasi komitmen komponen kesehatan sehingga ini menunjukkan bahwa kapasitas dari Pendamping sebagai implementor masih rendah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Program Keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Manganitu Kaupaten Kepulauan Sangihe masih belum berhasil dilaksanakan secara optimal karena : (1) Kurangnya komitmen, keahlian dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten sehingga menimbulkan ketidakpatuhan Pendamping selaku implementor terhadap sebagian besar prosedur dan standar aturan PKH; (2) Tidak adanya koordinasi dan pengawasan dari Pendamping dan materi sosialisai yang kurang menyebabkan kurangnya pemahaman RTSM selaku peserta program terhadap sebagian kewajiban kelompok sasaran program; (3) tidak melibatkan Pemerintah Desa dalam proses pendataan masyarakat miskin dan data PKH yang ada masih tidak *update* sehingga ada dua

RTSM yang tidak cocok menjadi penerima bantuan PKH; (4) Rumitnya birokrasi yang harus dilalui sehingga proses penyaluran dana bantuan memerlukan waktu lama yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pembayaran; (5) Rendahnya kapasitas dari Pendamping dalam pelaksanaan distribusi Form Verifikasi Komitmen untuk komponen Kesehatan.

Saran dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Pendamping harus meningkatkan komitmen dan keahliannya serta perlu pengawasan rutin dari UPPKH Kabupaten agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sesuai prosedur dan standar aturan PKH yang ada; (2) Pendamping harus rutin mengawasi RTSM lewat kunjungan rutin ke rumah-rumah, sekolah dan Posyandu serta perlunya peningkatan komitmen dari RTSM agar setiap kewajiban selkau kelompok sasaran program dapat ditunaikan dengan baik; (3) BPS perlu melibatkan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa bahkan perwakilan dari masyarakat agar seluruh data masyarakat miskin yang diperoleh benar-benar cocok menjadi penerima PKH; (4) Perlu koordinasi lagi antara UPPKH Kabupaten dengan UUPKH Pusat agar dapat mempercepat pelaksanaan pembayaran; (5) Kapasitas Pendamping lebih ditingkatkan agar pendistribusian Form Verifikasi Komitmen Komponen Kesehatan dapat diserahkan dan diisi oleh para Kader-Kader yang ada di Desa pelaksanaan PKH.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jaminan Sosial. 2011. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. Kementerian Sosial RI. Jakarta.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Gava Media. Yogyakarta
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. CV. Alfabeta. Bandung.

- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Ripley, Randall B. dan Franklin, Grace A. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. The Dorsey Press. Chicago.
- Saefullah, Djaja. 2009. *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik*. LP3AN Fisip Universitas Padjajaran. Bandung.
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. PT. Rafika Aditama. Bandung.
- _____. 2010 *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan bangsa (Menanggulangi Kemiskinan Dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat)*. PT. Elex Media Kompetindo. Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2010. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.